

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat nasional maupun tingkat daerah pembangunan sangat penting yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di dalam negara yang bersangkutan, Menurut khilmaninda (2018) kebijakan otonomi dalam suatu daerah secara efektif mulai dilaksanakan pada tahun. Pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pemerintah membutuhkan pendapatan yang dapat diandalkan untuk pembangunan agar dapat terselesaikan dan sesuai dengan yang diharapkan dan sudah dianggarkan sebelumnya.

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola pendapatannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia dalam wilayah tersebut dan sudah diatur dalam Undang-undang. Menurut Fidiana (2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam daerah yang bersangkutan yang di dalamnya terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurut Kustianingsih, Muslimin, Dan Kahar (2018) Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan dan semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka akan mengindikasikan bahwa sebuah daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan menunjukkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Daerah tersebut memiliki wewenang untuk memanfaatkan sepenuhnya keuangan daerah untuk

mengembangkan pembangunan dan program-program yang sedang dijalankan dan untuk memakmurkan masyarakat yang ada di daerahnya.

Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang penetapan jenis atau golongan retribusi menetapkan retribusi ke dalam tiga golongan yaitu retribusi daerah jasa umum, retribusi daerah jasa usaha dan retribusi daerah adalah Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang mengaturnya. Dari beberapa jenis retribusi yang ada bisa dimanfaatkan di antaranya yaitu Retribusi Parkir. Surabaya sebagai ibukota yang ada di Jawa Timur merupakan daerah yang berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah Kota Surabaya yang terus berupaya untuk menggali dan meningkatkan potensi pendapatan daerah yang ada di Kota Surabaya baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) untuk mendukung berjalannya sistem online termasuk parkir meter atau E-parkir. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya adalah kebijakan atau regulasi Kota Surabaya yang mengatur tentang Retribusi Parkir (Khilmaninda, 2018) berupa E-parkir yang ada di beberapa tempat yang ada di Kota Surabaya.

Mesin pembayaran non tunai untuk E-parkir yang ada di Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan sistem pembayaran kartu elektronik. Bank Indonesia ada lima bank yaitu Bank Jatim, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA dan Bank Mandiri yang bekerja sama sebagai mitra untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan akses pembayaran *E-money* untuk parkir meter. Program E-parkir ini diluncurkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada Sabtu, 03 Juni 2017 di halaman Taman Surya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2017) sebagai suatu upaya pemerintah daerah Kota Surabaya untuk meningkatkan penghasilan Kota Surabaya dan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya.

Sistem parkir yang dibayarkan secara non tunai ke mesin E-Parkir dan pembayaran tunai yang menggunakan karcis untuk dibayarkan pada juru parkir dan sudah tertera nominal biaya yang harus dibayarkan dapat disimpulkan dapat mengurangi kecurangan yang kebanyakan dilakukan oleh juru parkir, karena semua biaya yang harus dibayarkan sudah sesuai dengan lama penggunaan fasilitas parkir yang digunakan dan juru parkir tidak lagi memungut biaya melebihi tarif parkir yang sudah ditentukan. Semua transaksi pembayaran parkir akan masuk ke kas daerah dan terekam di data transaksi bank.

Retribusi Parkir menjadi pendapatan yang sangat rawan terjadinya kecurangan dalam menyampaikan atau menyetorkan besarnya Retribusi Parkir, karena masih banyak juru parkir yang masih memanfaatkan wilayah parkir yang tidak memberikan karcis dan mengambil biaya parkir yang melebihi dari tarif yang sudah ditetapkan. E-parkir menjadi upaya pemerintah untuk meminimalisir kebocoran Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya. Semakin meningkatnya kendaraan yang ada di Kota Surabaya membuat Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga harus meningkatkan lahan parkir yang nantinya juga bisa diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya. Untuk saat ini beberapa wilayah yang sudah menjadi lahan untuk Program E-Parkir yaitu berada di Jalan Jimerto, jalan Sedap Malam, dan Taman Bungkul.

Menurut Khilmaninda (2018) Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya pada tahun 2014 diterima sebesar Rp. 14.659.645.000, tahun 2015 sebesar Rp. 19.652.270.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 27.074.328.00. Hasil Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya dapat diketahui selalu meningkat untuk setiap tahunnya. Retribusi Parkir ini menjadi retribusi yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah yang juga membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya juga selalu meningkat untuk setiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pendapatan Retribusi Parkir Kota Surabaya sebelum dan sesudah ditetapkannya program E-Parkir. Penelitian ini ingin membuktikan adanya peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya setelah diberlakukannya program E-Parkir di beberapa

tempat yang ada di Kota Surabaya. Sistem Mesin E-Parkir ini menjadi bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir dan mengurangi terjadinya kebocoran Retribusi Parkir yang ada di Kota Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah:

1. Apakah ada perbedaan Pendapatan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkan E-parkir yang ada di Kota Surabaya?
2. Apakah ada perbedaan Pendapatan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah untuk wilayah yang sudah diterapkan E-parkir yang ada di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan Pendapatan Retribusi Parkir Kota Surabaya sebelum dan sesudah diluncurkan program E-Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pendapatan Retribusi Parkir Kota Surabaya sebelum dan sesudah diterapkannya E-Parkir yang ada di Kota Surabaya. serta bisa digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi yang mengambil penelitian mengenai Retribusi Parkir Kota Surabaya untuk perkembangan karya ilmiah di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengurangi terjadinya kebocoran dalam penerimaan dana Retribusi Parkir, dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan baik, dengan adanya beberapa mesin pembayaran non tunai atau E-Parkir yang sudah terpasang bisa meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kota Surabaya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian, tujuan penelitian dalam penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data yang digunakan, hasil analisis data, dan pembahasan atas penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 berisi tentang kesimpulan atas penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya.